

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PUSKESMAS BOYOLALI I

Wahyu Juwita Ardiningsih¹⁾, Sriyanto²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, STIE Atma Bhakti Surakarta

²⁾ Program Studi Akuntansi, STIE Atma Bhakti Surakarta

E-mail: ayujuwitaardi@gmail.com

Abstract

Finding out how organizational culture, human resource competency, and the local government's accounting system affect Puskesmas Boyolali I's financial report quality is the primary goal of this study. To ascertain the interplay of the investigated variables, the study employs a causal quantitative approach. A validity and reliability test has been conducted on the questionnaire that is used to gather data. This study employed census sampling to choose a representative sample of all employees from a population of 38. Using SPSS 2.6, we tested hypotheses and ran multiple linear regressions on the collected data. Results from the study and discussion indicate that organizational culture, human resource competency, and the local government accounting system all contribute to Puskesmas Boyolali I's high-quality financial reports.

Keywords : *competence, local government accounting system, organizational culture, quality of financial reports*

1. PENDAHULUAN

Kepala Daerah membentuk BLUD, Badan Layanan Umum Daerah, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten. Penyediaan barang dan jasa tanpa mengedepankan keuntungan berdasarkan produktivitas dan efektivitas. BLUD dapat menggunakan dana secara fleksibel untuk meningkatkan pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018. Fleksibilitas ini diberikan kepada unit kerja yang mengelola pendapatan, belanja, dan keuangan dengan Pola Pengelolaan BLUD. Fleksibilitas dalam hal investasi, pendapatan, pengadaan, pengelolaan keuangan, dan penganggaran.

Puskesmas adalah BLUD. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 79 Tahun 2018 optimis terhadap pelayanan publik yang efektif, efisien, murah, dan publik sesuai dengan praktik bisnis yang baik, kepatutan, dan keadilan BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi jangka pendek jika keuangannya stabil. Hal ini berdampak pada pelaporan keuangan Puskesmas

terhadap transparansi, akuntabilitas, dan maksimalisasi pelayanan publik.

Memahami pandangan Puskesmas dan pihak pengelola keuangan BLUD lainnya merupakan hal yang biasa. Dinas pemerintah daerah yang mengelola BLUD dan pengawas internal. Salah satu permasalahan dalam pengelolaan BLUD ini adalah belum adanya kesepakatan antar pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan badan layanan umum daerah. Dibutuhkan tenaga ahli tata kelola BLUD dan pengelolaan keuangan untuk pengelolaan keuangan Puskesmas. Puskesmas memerlukan tenaga berpengalaman yang dapat bekerja dengan cepat, sederhana, dan jelas untuk mengurangi kesalahan.

Kompetensi sumber daya manusia merupakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sifat kepribadian yang mempengaruhi kinerja, menurut Mangkunegara (2017). Latjandue et al. (2016) mengatakan kompetensi SDM mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Kompetensi adalah kunci prestasi kerja yang hebat. Tanpa kompetensi, sumber daya manusia tidak dapat bekerja secara efisien, efektif, atau terjangkau.

Pekerjaan akan tertunda dan energi terbuang sia-sia. Penyajian laporan keuangan lebih awal meningkatkan pengambilan keputusan (Moeheriono, 2009).

Standarisasi akuntansi pemerintah daerah meningkatkan perizinan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. SAPD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memastikan kualitas laporan keuangan. Aturan akuntansi pemerintahan kepala daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) mencatat, mengklasifikasikan, menafsirkan, dan meringkas kejadian dan laporan keuangan untuk melaksanakan APBD sesuai standar akuntansi, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara manual atau otomatis mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan menerbitkan data akuntabilitas APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006. Sistem akuntansi yang buruk membuat data keuangan tidak akurat dan menghambat pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2021).

Suprianto menyatakan bahwa budaya kerja yang sehat akan menghasilkan kinerja yang lebih baik (2019). Budaya kerja yang kuat meningkatkan kinerja, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia tentang Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB). Kinerja organisasi akan meningkat sebagai akibat dari hasil yang lebih baik, karena anggota staf sadar akan "pekerjaan yang perlu dilakukan dan bagaimana menyelesaikan pekerjaan tersebut". Budaya kerja diartikan sebagai nilai, norma, dan praktik bersama yang dibawa pegawai dalam pekerjaannya dan interaksi sehari-hari dengan rekan kerja sesuai Peraturan Menteri PAN RB No.30 Tahun 2012.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menguji hipotesis dengan menggunakan metodologi kuantitatif dan skala variabel. Analisis statistik menguji dan menjelaskan hipotesis. Studi ini meneliti bagaimana budaya perusahaan, instalasi, dan keterampilan SDM memengaruhi kualitas laporan keuangan. Data primer digunakan dalam penelitian ini. Survei lapangan dengan kuesioner data primer. Penelitian ini mengandalkan staf Puskesmas Boyolali I yang menjawab pertanyaan

peneliti secara tertulis dan lisan. Penelitian ini melibatkan petugas Puskesmas Boyolali I. Peneliti menggunakan metode sensus untuk memilih sampel. Sensus mengambil sampel seluruh populasi, menurut Sugiono (2017). Survei ini mengambil sampel pegawai Puskesmas Boyolali I. Pendekatan sensus mengambil sampel seluruh anggota populasi, sehingga penelitian ini mencakup 38 tanggapan. SPSS digunakan untuk pengujian hipotesis dan asumsi konvensional. Peneliti menguji data ini dengan regresi linier berganda. Penelitian ini mengevaluasi kualitas data menggunakan reliabilitas dan validitas. Utama, tempat, pengumpulan data, definisi variabel penelitian operasional, dan analisis.

3. LANDASAN TEORI

Kompetensi SDM

Kompetensi sumber daya manusia seseorang dapat didefinisikan sebagai serangkaian sifat dan kemampuan yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka secara kompeten, profesional, dan efisien. Ini termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang penting untuk pekerjaan tersebut. Kuesioner berdasarkan model skala Likert lima poin dari penelitian Roviyantie (2012).

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Akuntansi sektor publik merupakan istilah yang selama ini digunakan untuk merujuk pada akuntansi pemerintahan. Yang termasuk dalam ranah publik adalah entitas akuntansi seperti pemerintah, BUMN/BUMD, yayasan, dan lembaga nirlaba lainnya. Halim (2012) menyatakan bahwa Akuntansi keuangan daerah adalah proses identifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) sesuai kebutuhan. Menurut definisinya, akuntansi keuangan daerah adalah suatu

teknik pencatatan uang yang masuk dan keluar pada suatu instansi pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Yang dimaksud dengan proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dengan ukuran moneter, transaksi, dan kejadian yang pada umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indrastuti et al. (2012) adalah praktik akuntansi pemerintah daerah.

Budaya Organisasi

Menurut Schein (1985) sebagaimana dikutip dalam Riani (2011), budaya organisasi adalah asumsi-asumsi mendasar yang telah terbentuk dari waktu ke waktu. Asumsi-asumsi ini membantu kelompok tersebut menghadapi tantangan yang datang dari faktor internal dan eksternal, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, menurut David (2002), budaya organisasi adalah pola perilaku yang dipelajari dalam menanggapi tantangan dengan integrasi eksternal dan internal. Pola perilaku ini kemudian diteruskan kepada anggota baru sebagai cara untuk menjadi sadar, berpikir, dan merasakan.

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah memberikan informasi penting mengenai posisi keuangan pemerintah daerah dan seluruh transaksi dalam satu periode pelaporan, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Menurut Baridwan (1992) dalam Laporan Keuangan Daerah, laporan

keuangan merupakan ringkasan proses yang digunakan untuk mendokumentasikan transaksi keuangan yang terjadi dalam dua periode pelaporan. Menurut Mahmudi (2016), laporan keuangan diperlukan agar keputusan sosial, politik, dan ekonomi dapat lebih berkualitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	r hitung	Cronbach Alpha
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,765	0,650
	0,492	
	0,552	
	0,821	
	0,613	
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	0,688	0,659
	0,554	
	0,643	
	0,773	
	0,662	
Budaya Organisasi	0,760	0,713
	0,649	
	0,689	
	0,674	
Kualitas Laporan Keuangan	0,782	0,708
	0,713	
	0,608	
	0,595	
	0,709	

Sumber: Olah data, 2024

Tabel diatas menunjukkan hasil uji validitas seluruh variabel adalah valid karena nilai r taksirannya lebih besar dari 0,320 maka rtabel. Semua indikator menunjukkan bahwa variabel ini asli. Keandalan data ditentukan oleh fakta bahwa Cronbach's Alpha lebih dari 0,6, seperti yang ditunjukkan pada tabel di atas.

3.1.2 Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 2. Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta
(Constant)	-1.555	1.820	

Kompetensi Sumber Daya Manusia	.347	.161	.316
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	.294	.140	.293
Budaya Organisasi	.408	.141	.363

Sumber: Olah data, 2024

Dari tabel 2 dapat dihitung rumus persamaan regresi linier berganda:

$$Y = -1,555 + 0,316 X_1 + 0,293 X_2 + 0,363 X_3$$

- Laporan kualitas keuangan dapat dilihat sebagai konstanta -1,555. Apabila terdapat konsistensi dalam kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan, budaya organisasi, dan sistem akuntansi yang digunakan oleh pemerintah daerah.
- Kompetensi SDM memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,316. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi SDM akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (koefisien regresi 0,316).
- Koefisien regresi variabel sistem akuntansi pemerintahan daerah bernilai positif sebesar 0,293. Hal ini menunjukkan bahwa jika akuntabilitas pemerintah daerah membaik maka nilai variabel kualitas laporan keuangan akan naik sebesar 0,293%.
- Pada nilai 0,363, variabel budaya organisasi memiliki koefisien regresi positif. Nilai variabel kualitas laporan keuangan meningkat sebesar 0,363% seiring dengan berkembangnya budaya perusahaan.

3.1.3 Uji F

Tabel 3. Uji F

Model		F	Sig.
1	Regression	48.484	.000 ^b
	Residual		
	Total		

Sumber: Olah data, 2024

Budaya organisasi, sistem akuntansi pemerintah daerah, dan kemampuan sumber

daya manusia meningkatkan pelaporan keuangan, seperti yang terlihat pada Tabel 3.

3.1.4 Uji t

Tabel 4. Uji t

	t	Sig.
(Constant)	-.855	.399
Kompetensi Sumber Daya Manusia	2.151	.039
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah	2.108	.042
Budaya Organisasi	2.900	.006

Sumber: Olah data, 2024

- Variabel kompetensi sumber daya manusia mempunyai nilai t hitung sebesar 2,151 lebih besar dari t tabel sebesar 1,685 dan nilai signifikan sebesar 0,039 lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima. Terakhir, faktor kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
- Variabel sistem akuntansi pemerintahan daerah mempunyai nilai t hitung sebesar 2,108 lebih besar dari t tabel sebesar 1,685 dan nilai signifikansi sebesar 0,042 lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima. Kesimpulannya, unsur-unsur sistem akuntansi pemerintah daerah secara independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan.
- Variabel budaya organisasi mempunyai nilai t hitung sebesar 2,900 lebih dari t tabel sebesar 1,685 dan nilai signifikan sebesar 0,006 kurang dari 0,05 maka H_a dapat diterima. Kesimpulannya sistem akuntansi pemerintahan daerah elemen secara independen mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

3.1.5 Uji Koefisiensi Determinasi (R^2)

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.900 ^a	.811	.794

Sumber: Olah data, 2024

Berdasarkan tabel 5, koefisien determinasi (R²) adalah 0,794 yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, budaya organisasi, dan sistem akuntansi pemerintah daerah berkontribusi sebesar 79,4% terhadap varians kualitas laporan keuangan. Variabel independen dalam penelitian ini berkontribusi sebesar 20,6% terhadap varians keseluruhan.

4.2 Pembahasan

Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (H1), dengan nilai koefisien positif sebesar 0,316, nilai t sebesar 2,151 (lebih besar dari t tabel sebesar 1,685), dan nilai sig. sebesar 0,039. Penelitian ini dan penelitian lain yang dilakukan oleh Hadis et al. (2022) dan Wismoyo & Nasution (2022) menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Koefisien positif sebesar 0,293 dan nilai t hitung sebesar 2,108, yang lebih besar dari 1,685 dan sig. menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Karena 0,042 lebih kecil dari 0,05, H2, bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meningkatkan data keuangan, didukung. Dasmaran & Yulaeli (2018) dan Launtu (2021) menemukan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah meningkatkan pelaporan keuangan.

Penelitian ini menemukan bahwa budaya bisnis meningkatkan kualitas laporan keuangan ($r = 0,363$, $t = 2,900$, sig. Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa budaya organisasi dan pelaporan keuangan berhubungan positif dan signifikan secara statistik karena 0,006 kurang dari 0,05. Jauhari & Hazisma (2021) dan Ricardo et al (2023) menunjukkan bahwa akuntansi pemerintah daerah secara signifikan meningkatkan pelaporan keuangan, mendukung penelitian ini.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan penulisan terdahulu, kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan pelaporan keuangan. Dengan demikian, Puskesmas Boyolali I akan meningkatkan keuangannya dan mengembangkan sumber daya manusianya. Pelaporan keuangan sangat ditingkatkan oleh Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah. Pelaporan keuangan Puskesmas Boyolali I akan meningkat seiring dengan pertumbuhan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Laporan keuangan sangat ditingkatkan oleh budaya organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan budaya organisasi akan meningkatkan pelaporan keuangan Puskesmas Boyolali I.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak di Puskesmas Boyolali I yang telah memungkinkan penulis melakukan penelitian ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh civitas akademika STIE Atma Bhakti yang telah mendukung kelancaran pendidikan dan terlaksananya penelitian ini. Doa, dukungan, dan kasih sayangku yang tak terhingga dari orang tua tercinta juga sangat aku hargai.

7. REFERENSI

- Baridwan, Z. (1992). *Intermediate Accounting Edisi 7*. Fakultas Ekonomi UGM.
- Dasmaran, V., & Yulaeli, T. (2018). Pengaruh sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) Pandeglang. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(2), 170–178.
- David, F. R. (2002). *Manajemen Strategi, Konsep* (Edisi Ketujuh (ed.)). Prenhallindo.
- Hadis, F., Ihsan, H., Dwiharyadi, A., Septriani, Y., & Afni, Z. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi Dan Manajemen*, 17(2), 106–121.
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta*.
- Indrastuti, Sri, & Amries, Rusli, T. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*.
- Jauhari, H., & Hazisma, S. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap

- Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi*, 8(1), 104–121.
- Laksmi, R. A. (2011). *Budaya Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Latjandu, I., Kalangi, L., & Tinangon, J. J. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Accountability*, 5(2), 98–109.
- Launtu, A. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Kualitas Sumberdaya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gowa. *AkMen Jurnal Ilmiah*, 18(1), 14–27.
- Mahmudi, M. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. *Edisi Ketiga, Upp Stim Ykpn*, Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. A. P. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Bandung)*. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Ghalia Indonesia.
- Ricardo, R., Trisna, W. V., & Astika, F. (2023). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (BLUD) Puskesmas Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 13(1), 117–125. <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.4388>
- Roviyantie, D. (2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol.1 No.1.
- Supriyanto, A. S., & Ekowati, V. M. (2019). *Riset manajemen SDM untuk skripsi, tesis, disertasi, dan dilengkapi dengan contoh artikel rurnal*. Inteligensia Media.
- Wismoyo, U., & Nasution, J. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Puskesmas BLUD Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 29–39.